

KEBIJAKAN FISKAL, MONETER, DAN STRUKTUR DISTRIBUSI KEKUASAAN DAN EKONOMI PADA RUANG

Sumanti¹, Fitria Nilda², Syatria Hasni³, Yustina⁴, Elmasi Tri Oktaviani⁵
^{1,2,3,4,5}Magister Pendidikan Dasar, Universitas Adzkia, Padang, Indonesia

¹sumanti@adzkia.ac.id, ²fitrianilda102@gmail.com
³hasnisibungsu1995@gmail.com, ⁴yustinatina408@gmail.com,
⁵sitrioktaviani73@gmail.com

Abstrak

Keanggotaan Indonesia dalam BRICS mencerminkan upaya memperluas kerja sama ekonomi di tengah perubahan tatanan ekonomi global yang semakin multipolar. Artikel ini bertujuan menganalisis prospek dan tantangan keanggotaan Indonesia dalam BRICS bagi perekonomian nasional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang bersumber dari berbagai artikel ilmiah terkait BRICS, *Global South*, ekonomi politik internasional, dan perdagangan global. Hasil kajian menunjukkan bahwa BRICS berpotensi meningkatkan akses pasar, peluang investasi, serta posisi tawar Indonesia dalam tata kelola ekonomi global. Tantangan yang dihadapi meliputi dinamika geopolitik, persaingan ekonomi antaranggota, dan kebutuhan penguatan daya saing domestik. Efektivitas pemanfaatan peluang tersebut bergantung pada kemampuan Indonesia dalam menyesuaikan kebijakan ekonomi dan memperkuat kapasitas nasional di tengah perubahan lingkungan ekonomi internasional.

Kata kunci: BRICS, Indonesia, ekonomi global, Global South, geoekonomi.

Abstract

Indonesia's membership in BRICS reflects an effort to expand economic cooperation amid the transition toward a more multipolar global economic order. This article examines the prospects and challenges of Indonesia's BRICS membership for the national economy. The study employs a qualitative approach through a literature review of scholarly works on BRICS, the *Global South*, international political economy, and global trade. The findings indicate that BRICS may enhance market access, investment opportunities, and Indonesia's bargaining position in global economic governance. However, challenges remain, including geopolitical dynamics, economic competition among member states, and the need to strengthen domestic competitiveness. The benefits of BRICS membership will largely depend on Indonesia's ability to adapt its economic policies and improve national capacity in a changing international economic environment.

Keywords: BRICS, Indonesia, global economy, Global South, geoeconomics.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki cadangan mineral strategis dalam jumlah besar, terutama nikel, bauksit, tembaga, dan timah. Posisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai aktor penting dalam rantai pasok mineral global yang berkaitan dengan industri manufaktur dan transisi energi. Nursahan dan Sunuhadi (2023) menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya nikel yang tersebar di berbagai wilayah, terutama Sulawesi dan Maluku. Warburton (2024) mencatat bahwa peningkatan permintaan mineral kritis telah memperkuat posisi Indonesia dalam pasar global. Libassi (2025) juga menunjukkan bahwa nikel Indonesia menjadi komponen penting dalam pengembangan industri baterai kendaraan listrik di tingkat internasional.

Pemanfaatan sumber daya mineral selama beberapa dekade didominasi oleh kegiatan ekstraksi dan ekspor bahan mentah dengan nilai tambah yang relatif terbatas. Pemerintah kemudian mendorong kebijakan hilirisasi sebagai instrumen untuk meningkatkan nilai tambah komoditas mineral melalui pengolahan di dalam negeri. Menurut Rifa'i et al. (2025), kebijakan larangan ekspor bijih nikel dirancang untuk mendorong pembangunan industri pengolahan dan pemurnian. Abdullah dan Sumner (2025) memandang hilirisasi sebagai bagian dari strategi transformasi struktural berbasis sumber daya alam. Setiawan (2025) menilai bahwa hilirisasi juga berkaitan

dengan upaya memperkuat kedaulatan ekonomi nasional melalui penguasaan rantai nilai mineral.

Implementasi hilirisasi ditandai oleh pembangunan berbagai fasilitas *smelter* dan kawasan industri yang terintegrasi dengan kegiatan pengolahan mineral. Warburton (2024) mengidentifikasi munculnya kawasan industri mineral yang berkembang sebagai pusat akumulasi investasi baru. Rifa'i et al. (2025) menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi menghasilkan perubahan struktur produksi dari ekspor bahan mentah menuju ekspor produk setengah jadi dan produk olahan. Malik (2024) menjelaskan bahwa perkembangan industri pengolahan nikel telah menarik berbagai pelaku usaha yang terlibat dalam rantai pasok kendaraan listrik global.

Arus investasi yang masuk ke sektor hilirisasi menunjukkan peningkatan yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir. Kawasan industri seperti Morowali, Weda Bay, dan Konawe berkembang sebagai pusat investasi yang didukung oleh infrastruktur industri dan logistik. Warburton (2024) menyebut fenomena tersebut sebagai pembentukan *industrial enclaves* yang terkonsentrasi pada wilayah tertentu. Malik (2024) mengemukakan bahwa investasi pada sektor nikel didorong oleh kebutuhan pasar global terhadap bahan baku baterai. Cerri et al. (2025) juga menemukan bahwa rantai nilai nikel Indonesia semakin terhubung dengan jaringan perdagangan dan industri internasional.

Perkembangan investasi tersebut menghasilkan perubahan pada struktur distribusi kekuasaan ekonomi di tingkat nasional maupun regional. Penguasaan modal, teknologi, dan akses terhadap pasar global menjadi faktor yang menentukan posisi aktor ekonomi dalam rantai nilai industri nikel. Abdullah dan Sumner (2025) menjelaskan bahwa kebijakan industri sering kali membentuk pola hubungan baru antara negara, perusahaan, dan wilayah produksi. Judijanto (2025) menyoroti pentingnya aspek kedaulatan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya strategis. Warburton (2024) menunjukkan bahwa konsentrasi investasi dapat memengaruhi distribusi pengaruh ekonomi antarkawasan.

Konsentrasi kegiatan industri pengolahan pada beberapa wilayah tertentu memunculkan dinamika spasial yang menarik untuk dikaji. Kawasan penghasil mineral memperoleh aliran investasi, pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan aktivitas ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang tidak terlibat langsung dalam rantai nilai hilirisasi. Adam dan Nurwanah (2025) menemukan bahwa ledakan ekonomi berbasis sumber daya di Maluku Utara menghasilkan perubahan signifikan terhadap struktur fiskal daerah. Myllyvirta et al. (2024) mencatat bahwa manfaat ekonomi hilirisasi tidak selalu tersebar secara merata pada seluruh wilayah. Abdullah dan Sumner (2025) menghubungkan kondisi tersebut dengan karakteristik pembangunan

industri yang cenderung terkonsentrasi.

Kajian mengenai hilirisasi umumnya menyoroti peningkatan investasi, ekspor, dan pertumbuhan ekonomi. Rifa'i et al. (2025) menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi memberikan dampak positif terhadap beberapa indikator ekonomi nasional. Setiawan (2025) menilai bahwa penguatan industri pengolahan dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam perdagangan global. Libassi (2025) juga menjelaskan bahwa nikel Indonesia memperoleh peran yang semakin strategis dalam industri energi masa depan. Meskipun demikian, distribusi manfaat ekonomi antarwilayah masih menjadi isu yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Ketimpangan spasial dapat muncul ketika aktivitas ekonomi terkonsentrasi pada lokasi tertentu sementara wilayah lain tidak memperoleh manfaat yang setara. Adam dan Nurwanah (2025) menunjukkan bahwa daerah penghasil sumber daya menghadapi kecenderungan ketergantungan fiskal terhadap sektor komoditas. Myllyvirta et al. (2024) mengemukakan bahwa peningkatan nilai tambah industri belum secara otomatis mencerminkan distribusi manfaat yang proporsional bagi masyarakat dan wilayah. Abdullah dan Sumner (2025) menegaskan bahwa pembangunan keterkaitan ekonomi (*linkages*) menjadi faktor penting dalam memperluas dampak industri terhadap perekonomian regional.

Aspek lingkungan dan sosial juga menjadi bagian dari diskusi

mengenai hilirisasi industri mineral. Kurniawan et al. (2025) menemukan bahwa ekspansi industri nikel memiliki keterkaitan dengan peningkatan kebutuhan energi berbasis bahan bakar fosil. Astuti et al. (2025) menyoroti pentingnya perspektif keadilan komunitas dalam proses transformasi industri mineral. Tela dan Yu (2025) menunjukkan bahwa perhatian terhadap dampak lingkungan industri nikel semakin berkembang dalam diskursus publik internasional. Dinamika tersebut memperlihatkan bahwa manfaat ekonomi perlu dianalisis bersamaan dengan konsekuensi sosial dan ekologis yang menyertainya.

Persoalan distribusi manfaat juga berkaitan dengan tata kelola sumber daya dan kelembagaan. Supriadi et al. (2025) menjelaskan bahwa pengelolaan sektor pertambangan menghadapi berbagai tantangan yang berhubungan dengan transparansi dan akuntabilitas. Bria et al. (2025) menekankan perlunya pendekatan yang mempertimbangkan keterkaitan antara aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola dalam transisi energi. Astuti et al. (2025) memandang bahwa keterlibatan masyarakat lokal menjadi elemen penting dalam memastikan distribusi manfaat yang lebih inklusif.

Perubahan struktur ekonomi akibat hilirisasi menunjukkan bahwa pembangunan berbasis sumber daya tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi industri, tetapi juga dengan pembentukan pusat-pusat kekuatan ekonomi baru. Warburton (2024) mengidentifikasi

munculnya kawasan industri yang memiliki peran dominan dalam pengelolaan rantai nilai nikel. Malik (2024) menjelaskan bahwa aktor-aktor industri besar memiliki posisi penting dalam menentukan arah pengembangan sektor tersebut. Cerri et al. (2025) menunjukkan bahwa hubungan antara investasi, tenaga kerja, dan perdagangan menjadi bagian dari konfigurasi kekuasaan ekonomi yang berkembang dalam industri nikel Indonesia.

Berdasarkan berbagai perkembangan tersebut, kajian mengenai dampak kebijakan hilirisasi terhadap distribusi kekuasaan ekonomi dan ketimpangan spasial menjadi relevan untuk dilakukan. Fokus kajian diarahkan pada hubungan antara konsentrasi investasi, perubahan struktur ekonomi regional, serta distribusi manfaat pembangunan antarwilayah. Warburton (2024) menegaskan bahwa hilirisasi telah membentuk lanskap ekonomi baru di kawasan penghasil mineral. Abdullah dan Sumner (2025) menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi struktural dipengaruhi oleh kemampuan membangun keterkaitan ekonomi yang kuat. Adam dan Nurwanah (2025) memperlihatkan bahwa konsekuensi fiskal dan regional dari *resource boom* perlu dianalisis secara lebih mendalam untuk memahami implikasi spasial kebijakan hilirisasi di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode

studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji dampak kebijakan hilirisasi industri terhadap distribusi kekuasaan ekonomi dan ketimpangan spasial di Indonesia melalui penelaahan berbagai sumber ilmiah yang relevan. Studi pustaka memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola, kecenderungan, dan dinamika yang muncul dari hasil penelitian terdahulu terkait hilirisasi nikel, investasi industri, pembangunan wilayah, serta ekonomi politik sumber daya alam.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, *working paper*, laporan lembaga penelitian, dokumen kebijakan, dan publikasi resmi yang diterbitkan pada periode 2021–2025. Sumber literatur dipilih berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian, terutama yang membahas hilirisasi mineral, konsentrasi investasi, distribusi manfaat ekonomi, dan ketimpangan wilayah. Literatur yang digunakan berasal dari sumber nasional maupun internasional untuk memperoleh perspektif yang beragam mengenai perkembangan hilirisasi industri di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, seleksi, dan telaah literatur yang sesuai dengan fokus penelitian. Proses penelusuran literatur dilakukan menggunakan basis data akademik seperti Google Scholar, ScienceDirect, SpringerLink, dan berbagai repositori publikasi ilmiah lainnya. Literatur yang terpilih kemudian diklasifikasikan

berdasarkan tema pembahasan, meliputi kebijakan hilirisasi, investasi dan rantai nilai nikel, ketimpangan wilayah, serta aspek ekonomi politik dan lingkungan.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Tahapan analisis meliputi reduksi data, pengelompokan temuan berdasarkan tema, interpretasi hasil kajian, serta sintesis berbagai perspektif yang ditemukan dalam literatur. Analisis difokuskan pada hubungan antara kebijakan hilirisasi, konsentrasi investasi, perubahan distribusi kekuasaan ekonomi, dan implikasinya terhadap ketimpangan spasial di Indonesia. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menjelaskan pola-pola yang berkembang dalam implementasi hilirisasi industri serta konsekuensinya terhadap struktur ekonomi regional.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dampak Hilirisasi terhadap Distribusi Kekuasaan Ekonomi

Kebijakan hilirisasi industri di Indonesia berkembang sebagai bagian dari strategi transformasi ekonomi yang bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral melalui proses pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Implementasi kebijakan tersebut memperoleh landasan yang lebih kuat setelah pemberlakuan regulasi terkait mineral dan batubara yang membatasi ekspor bahan mentah. Rifa'i et al. (2025)

menjelaskan bahwa kebijakan moratorium ekspor bijih nikel dirancang untuk mendorong pembentukan industri pengolahan domestik. Setiawan (2025) menilai bahwa kerangka hukum hilirisasi mencerminkan upaya penguatan posisi negara dalam pengelolaan sumber daya strategis. Abdullah dan Sumner (2025) menghubungkan kebijakan tersebut dengan agenda transformasi struktural yang berbasis pada pengembangan keterkaitan industri (*industrial linkages*).

Pelarangan ekspor mineral mentah menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan hilirisasi karena menciptakan insentif bagi pembangunan fasilitas pengolahan di dalam negeri. Menurut Warburton (2024), kebijakan tersebut mendorong terbentuknya pusat-pusat industri baru yang terintegrasi dengan aktivitas pertambangan. Libassi (2025) menunjukkan bahwa peningkatan kebutuhan global terhadap nikel untuk industri baterai memperkuat daya tarik investasi pada sektor pengolahan mineral Indonesia. Dorigné-Thomson (2023) mencatat bahwa pengelolaan komoditas strategis juga menjadi bagian dari instrumen diplomasi ekonomi Indonesia dalam memperluas posisi tawar di tingkat internasional.

Perkembangan hilirisasi ditandai oleh pembangunan berbagai fasilitas *smelter* yang tersebar pada wilayah penghasil mineral. Nursahan dan Sunuhadi (2023) menjelaskan bahwa persebaran cadangan nikel Indonesia terkonsentrasi pada kawasan Sulawesi dan Maluku

sehingga pembangunan industri pengolahan banyak diarahkan ke wilayah tersebut. Rifa'i et al. (2025) menunjukkan bahwa pembangunan *smelter* berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas produksi produk olahan mineral. Warburton (2024) mengemukakan bahwa kawasan industri berbasis nikel berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang terhubung dengan pasar global.

Sulawesi Tengah menjadi salah satu wilayah yang mengalami perkembangan hilirisasi paling intensif melalui keberadaan kawasan industri Morowali. Kawasan ini berkembang sebagai pusat pengolahan nikel yang terintegrasi dengan aktivitas pertambangan dan manufaktur. Menurut Warburton (2024), Morowali merupakan contoh pembentukan *industrial enclave* yang mengonsentrasikan investasi, tenaga kerja, dan infrastruktur industri dalam satu kawasan. Malik (2024) menjelaskan bahwa kawasan tersebut memiliki posisi penting dalam rantai pasok kendaraan listrik global. Cerri et al. (2025) menunjukkan bahwa aktivitas industri di Morowali juga membentuk hubungan baru antara perdagangan internasional dan pasar tenaga kerja.

Sulawesi Tenggara merupakan wilayah lain yang mengalami peningkatan aktivitas hilirisasi, terutama di Kabupaten Konawe dan Konawe Utara. Keberadaan cadangan nikel dalam jumlah besar menjadi faktor yang mendorong masuknya investasi industri pengolahan. Nursahan dan Sunuhadi (2023)

mengidentifikasi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu daerah utama penghasil nikel nasional. Malik (2024) mencatat bahwa pengembangan rantai pasok nikel mendorong peningkatan keterhubungan antara sektor pertambangan dan industri pengolahan. Supriadi et al. (2025) menunjukkan bahwa percepatan investasi pada sektor pertambangan juga memunculkan tantangan tata kelola sumber daya di tingkat daerah.

Maluku Utara menunjukkan pola perkembangan yang serupa melalui ekspansi kawasan industri berbasis nikel di Weda Bay. Adam dan Nurwanah (2025) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah meningkat seiring berkembangnya aktivitas industri mineral. Warburton (2024) menjelaskan bahwa Weda Bay menjadi salah satu pusat investasi terbesar dalam industri nikel Indonesia. Myllyvirta et al. (2024) mencatat bahwa peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut menghasilkan perubahan pada struktur fiskal daerah sekaligus menimbulkan perdebatan mengenai distribusi manfaat ekonomi yang diterima masyarakat lokal.

Ekspansi hilirisasi juga mulai berkembang di beberapa wilayah Kalimantan yang memiliki sumber daya mineral dan infrastruktur pendukung industri. Abdullah dan Sumner (2025) menjelaskan bahwa pengembangan kawasan industri di luar pusat-pusat produksi utama menjadi bagian dari upaya memperluas keterkaitan ekonomi regional. Setiawan (2025) mengemukakan bahwa perluasan

lokasi hilirisasi dapat memperkuat integrasi antara sektor ekstraktif dan sektor manufaktur. Libassi (2025) menunjukkan bahwa peningkatan permintaan global terhadap mineral kritis menciptakan peluang bagi pengembangan kawasan industri baru di berbagai wilayah Indonesia.

Perkembangan investasi menjadi salah satu indikator utama keberhasilan implementasi hilirisasi. Arus Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada sektor mineral menunjukkan tren peningkatan setelah pemberlakuan kebijakan larangan ekspor bijih nikel. Rifa'i et al. (2025) menjelaskan bahwa kebijakan hilirisasi menghasilkan dampak ekonomi yang meluas melalui peningkatan aktivitas investasi. Malik (2024) menunjukkan bahwa sektor nikel memperoleh perhatian besar dari investor yang terlibat dalam industri kendaraan listrik. Judijanto (2025) mengaitkan peningkatan investasi tersebut dengan dinamika kerja sama ekonomi internasional dan kepentingan strategis negara-negara mitra dagang.

Meskipun investasi meningkat, distribusi investasi menunjukkan kecenderungan terkonsentrasi pada beberapa kawasan industri tertentu. Warburton (2024) mengidentifikasi Morowali dan Weda Bay sebagai pusat akumulasi modal yang dominan dalam industri nikel nasional. Adam dan Nurwanah (2025) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah penghasil sumber daya belum selalu diikuti oleh pemerataan manfaat antarwilayah.

Abdullah dan Sumner (2025) menjelaskan bahwa keterkaitan ekonomi yang terbatas dapat mengurangi penyebaran manfaat industri ke daerah yang berada di luar pusat produksi.

Peran investor asing memiliki pengaruh yang cukup besar dalam perkembangan hilirisasi nikel Indonesia. Malik (2024) menjelaskan bahwa investasi asing menyediakan akses terhadap teknologi, pembiayaan, dan jaringan pasar internasional yang diperlukan dalam pengembangan industri pengolahan mineral. Cerri et al. (2025) menunjukkan bahwa keterlibatan perusahaan internasional telah membentuk konfigurasi baru dalam rantai nilai nikel Indonesia. Libassi (2025) mengemukakan bahwa ketergantungan terhadap modal global perlu dianalisis bersama dengan tujuan peningkatan kedaulatan ekonomi nasional. Hubungan antara investasi asing, penguasaan teknologi, dan pengendalian rantai nilai menjadi salah satu karakteristik utama dalam perkembangan hilirisasi industri Indonesia pada periode terkini.

Dampak Hilirisasi terhadap Ketimpangan Spasial

Implementasi hilirisasi nikel telah mendorong munculnya pusat-pusat ekonomi baru yang berlokasi di kawasan penghasil mineral strategis. Perkembangan kawasan industri di Morowali, Weda Bay, dan Konawe menunjukkan perubahan orientasi ekonomi dari aktivitas ekstraksi menuju pengolahan mineral bernilai

tambah. Warburton (2024) menjelaskan bahwa kawasan industri tersebut berkembang sebagai pusat industrialisasi baru yang terkoneksi dengan pasar global. Rifa'i et al. (2025) menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi pada wilayah penghasil nikel. Nursahan dan Sunuhadi (2023) mengemukakan bahwa persebaran cadangan mineral menjadi faktor utama yang memengaruhi lokasi pertumbuhan kawasan industri.

Pertumbuhan kawasan industri berbasis nikel menghasilkan peningkatan aktivitas investasi, pembangunan infrastruktur, dan mobilitas tenaga kerja. Malik (2024) mencatat bahwa pengembangan rantai pasok kendaraan listrik telah meningkatkan kebutuhan terhadap produk olahan nikel Indonesia. Libassi (2025) menjelaskan bahwa posisi Indonesia dalam rantai pasok mineral global semakin kuat seiring meningkatnya kapasitas pengolahan domestik. Menurut Cerri et al. (2025), perkembangan industri nikel juga memperluas hubungan perdagangan internasional yang melibatkan berbagai aktor ekonomi lintas negara.

Perubahan pola pertumbuhan wilayah menunjukkan adanya redistribusi aktivitas ekonomi dari pusat-pusat ekonomi lama menuju kawasan industri mineral. Adam dan Nurwanah (2025) menemukan bahwa wilayah yang menjadi lokasi hilirisasi mengalami peningkatan penerimaan fiskal dan aktivitas produksi. Abdullah dan Sumner (2025) menjelaskan bahwa transformasi struktural

berbasis sumber daya alam dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru apabila didukung oleh keterkaitan sektor industri. Warburton (2024) menunjukkan bahwa kawasan industri nikel berperan sebagai titik konsentrasi investasi dalam skala besar.

Perkembangan tersebut sekaligus memperlihatkan kecenderungan konsentrasi modal pada beberapa wilayah tertentu. Investasi pada sektor hilirisasi sebagian besar terpusat pada kawasan yang memiliki cadangan nikel, infrastruktur pendukung, dan akses terhadap pasar ekspor. Menurut Rifa'i et al. (2025), kebijakan hilirisasi menghasilkan peningkatan investasi yang relatif terkonsentrasi pada pusat produksi mineral. Malik (2024) menjelaskan bahwa kebutuhan modal yang tinggi dalam pembangunan *smelter* membatasi keterlibatan pelaku usaha berskala kecil. Abdullah dan Sumner (2025) mengaitkan fenomena tersebut dengan karakteristik industri pengolahan yang membutuhkan investasi jangka panjang dan teknologi intensif.

Konsentrasi investasi berdampak pada munculnya dominasi perusahaan besar dalam pengelolaan rantai nilai industri nikel. Warburton (2024) menyebut kawasan industri nikel di Indonesia sebagai bentuk *industrial enclave* yang didominasi oleh perusahaan dengan kapasitas modal dan teknologi yang besar. Libassi (2025) menunjukkan bahwa pengembangan industri baterai global meningkatkan posisi strategis

perusahaan yang menguasai proses pengolahan mineral. Cerri et al. (2025) menjelaskan bahwa struktur rantai nilai nikel memperlihatkan kecenderungan konsentrasi pengambilan keputusan pada aktor ekonomi utama.

Dominasi perusahaan besar menciptakan hubungan ekonomi yang semakin kompleks antara pemerintah, investor, dan masyarakat lokal. Setiawan (2025) menjelaskan bahwa negara memiliki peran sentral dalam mengatur arah kebijakan hilirisasi melalui instrumen regulasi dan perizinan. Judijanto (2025) mengemukakan bahwa kepentingan ekonomi strategis sering kali memengaruhi pola kerja sama antara pemerintah dan investor. Malik (2024) menunjukkan bahwa keterlibatan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor yang menentukan keberlanjutan pengembangan industri nikel.

Ketergantungan daerah terhadap investasi menjadi salah satu konsekuensi dari perkembangan hilirisasi. Adam dan Nurwanah (2025) menemukan bahwa daerah yang mengalami *resource boom* menunjukkan peningkatan ketergantungan terhadap sektor berbasis sumber daya alam. Abdullah dan Sumner (2025) menjelaskan bahwa keterkaitan ekonomi yang terbatas dapat meningkatkan kerentanan wilayah terhadap perubahan investasi. Myllyvirta et al. (2024) mengemukakan bahwa peningkatan aktivitas industri tidak selalu menghasilkan distribusi

manfaat yang proporsional bagi seluruh kelompok masyarakat.

Perubahan distribusi kekuasaan ekonomi juga terlihat dari pergeseran aktor ekonomi dominan di tingkat lokal. Sebelum hilirisasi berkembang, aktivitas ekonomi di banyak wilayah penghasil nikel didominasi oleh sektor pertambangan primer dan perdagangan komoditas mentah. Warburton (2024) menunjukkan bahwa perkembangan kawasan industri menciptakan pusat kekuatan ekonomi baru yang berorientasi pada pengolahan mineral. Rifa'i et al. (2025) menjelaskan bahwa nilai tambah ekonomi semakin terkonsentrasi pada aktivitas hilir dibandingkan aktivitas ekstraksi. Libassi (2025) menghubungkan perubahan tersebut dengan meningkatnya permintaan global terhadap produk olahan nikel.

Korporasi industri memiliki pengaruh yang semakin besar dalam arah pembangunan daerah yang menjadi lokasi investasi. Malik (2024) menjelaskan bahwa perusahaan berperan dalam pembangunan infrastruktur, penyediaan lapangan kerja, dan pengembangan kawasan industri. Adam dan Nurwanah (2025) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah penghasil sering kali berkorelasi dengan ekspansi industri berbasis sumber daya alam. Warburton (2024) menunjukkan bahwa konsentrasi investasi dapat memperkuat posisi korporasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi di tingkat lokal.

Posisi masyarakat lokal dalam rantai nilai industri masih menjadi

salah satu isu yang banyak dibahas dalam literatur. Astuti et al. (2025) menekankan pentingnya pendekatan berbasis keadilan komunitas dalam pengelolaan sektor nikel. Cerri et al. (2025) menunjukkan bahwa distribusi manfaat ekonomi dalam rantai nilai industri dipengaruhi oleh akses terhadap pekerjaan, keterampilan, dan kesempatan usaha. Myllyvirta et al. (2024) mengemukakan bahwa peningkatan nilai tambah industri tidak selalu mencerminkan peningkatan manfaat ekonomi yang merata pada tingkat lokal.

Dimensi lingkungan turut memengaruhi distribusi kekuasaan ekonomi yang terbentuk melalui hilirisasi. Kurniawan et al. (2025) menjelaskan bahwa ekspansi industri nikel memiliki keterkaitan dengan peningkatan kebutuhan energi berbasis bahan bakar fosil. Tela dan Yu (2025) menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap dampak lingkungan industri nikel menjadi bagian dari diskursus global mengenai keberlanjutan. Bria et al. (2025) mengemukakan bahwa analisis sektor mineral memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan keterkaitan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Tata kelola sumber daya menjadi faktor yang menentukan arah distribusi manfaat dan kekuasaan ekonomi hasil hilirisasi. Supriadi et al. (2025) menjelaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen yang memengaruhi efektivitas pengelolaan sektor pertambangan. Setiawan (2025) mengemukakan bahwa

keberhasilan hilirisasi berkaitan dengan kemampuan negara dalam mengatur hubungan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan sumber daya. Abdullah dan Sumner (2025) menunjukkan bahwa pembangunan keterkaitan ekonomi yang kuat dapat memperluas distribusi manfaat industri ke wilayah dan kelompok masyarakat yang lebih beragam.

Tantangan dan Implikasi Kebijakan

Kebijakan hilirisasi nikel telah menghasilkan peningkatan aktivitas industri dan investasi pada sejumlah wilayah penghasil mineral di Indonesia. Meskipun demikian, perkembangan tersebut juga menghadirkan berbagai tantangan yang berkaitan dengan struktur ekonomi, distribusi manfaat, dan tata kelola pembangunan. Warburton (2024) menjelaskan bahwa industrialisasi berbasis mineral di Indonesia berkembang melalui konsentrasi investasi pada kawasan industri tertentu. Rifa'i et al. (2025) menunjukkan bahwa dampak ekonomi hilirisasi bersifat berbeda antarwilayah sesuai dengan tingkat keterlibatan dalam rantai nilai industri. Abdullah dan Sumner (2025) mengemukakan bahwa transformasi struktural memerlukan keterkaitan ekonomi yang kuat agar manfaat industri dapat menjangkau wilayah yang lebih luas.

Ketergantungan terhadap komoditas mineral menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan hilirisasi. Struktur ekonomi yang terlalu bergantung pada nikel

berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap perubahan harga komoditas global dan dinamika permintaan internasional. Libassi (2025) menjelaskan bahwa perkembangan industri baterai telah meningkatkan posisi strategis nikel dalam pasar global. Menurut Nursahan dan Sunuhadi (2023), cadangan nikel Indonesia menjadi basis utama pengembangan industri hilir nasional. Kurniawan et al. (2025) menunjukkan bahwa orientasi pembangunan yang berpusat pada komoditas tertentu memerlukan perhatian terhadap keberlanjutan jangka panjang.

Dominasi modal besar juga menjadi karakteristik yang menonjol dalam perkembangan hilirisasi. Kebutuhan investasi yang tinggi untuk pembangunan *smelter* dan kawasan industri menyebabkan sektor ini didominasi oleh perusahaan berskala besar. Malik (2024) menjelaskan bahwa pengembangan rantai pasok nikel memerlukan dukungan teknologi dan pembiayaan yang besar. Warburton (2024) mengidentifikasi munculnya *industrial enclaves* yang terkonsentrasi pada sejumlah wilayah tertentu. Cerri et al. (2025) menunjukkan bahwa struktur rantai nilai nikel global cenderung menempatkan perusahaan besar sebagai aktor utama dalam proses produksi dan perdagangan.

Konsentrasi modal berimplikasi terhadap distribusi kekuasaan ekonomi di tingkat regional. Wilayah yang menjadi lokasi investasi memperoleh akses yang lebih besar terhadap infrastruktur, lapangan kerja, dan aktivitas ekonomi dibandingkan

daerah yang berada di luar kawasan industri. Adam dan Nurwanah (2025) menemukan bahwa daerah penghasil nikel mengalami peningkatan aktivitas fiskal setelah berkembangnya industri pengolahan. Abdullah dan Sumner (2025) menjelaskan bahwa keterbatasan hubungan ekonomi antarsektor dapat mengurangi penyebaran manfaat pembangunan. Myllyvirta et al. (2024) mencatat bahwa peningkatan nilai tambah industri tidak selalu diikuti oleh distribusi manfaat yang merata antarwilayah.

Kesenjangan pembangunan regional menjadi isu yang sering dikaitkan dengan kebijakan hilirisasi. Pertumbuhan ekonomi yang terkonsentrasi di Morowali, Weda Bay, dan Konawe menunjukkan adanya perbedaan dinamika pembangunan dengan wilayah non-penghasil mineral. Warburton (2024) menjelaskan bahwa kawasan industri nikel berkembang sebagai pusat akumulasi investasi dan produksi. Adam dan Nurwanah (2025) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sumber daya dapat menghasilkan pola ketergantungan fiskal tertentu. Myllyvirta et al. (2024) mengemukakan bahwa manfaat ekonomi industri hilir memiliki variasi distribusi pada tingkat regional.

Aspek lingkungan menjadi tantangan lain yang muncul bersamaan dengan ekspansi industri nikel. Kurniawan et al. (2025) menemukan bahwa peningkatan aktivitas pengolahan mineral berkaitan dengan kebutuhan energi

yang masih didominasi sumber berbasis fosil pada sejumlah kawasan industri. Tela dan Yu (2025) menunjukkan bahwa dampak lingkungan industri nikel menjadi perhatian dalam diskursus publik internasional. Bria et al. (2025) menjelaskan bahwa analisis sektor mineral memerlukan pendekatan yang memperhatikan keterkaitan antara dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Persoalan sosial juga menjadi bagian dari dinamika hilirisasi di tingkat lokal. Perubahan struktur ekonomi dan peningkatan arus investasi dapat memengaruhi pola hubungan antara masyarakat, pemerintah daerah, dan perusahaan. Astuti et al. (2025) menekankan pentingnya perspektif keadilan komunitas dalam pengelolaan sektor nikel. Malik (2024) menunjukkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan lokal menjadi faktor yang memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap aktivitas industri. Astuti et al. (2025) dalam *working paper* ANU juga menggarisbawahi perlunya perhatian terhadap distribusi manfaat pada kelompok masyarakat yang terdampak langsung.

Tantangan tata kelola sumber daya turut memengaruhi efektivitas implementasi hilirisasi. Kompleksitas hubungan antara pemerintah, investor, dan masyarakat memerlukan mekanisme pengawasan yang memadai. Supriadi et al. (2025) menunjukkan bahwa persoalan tata kelola pertambangan dapat memengaruhi kualitas distribusi

manfaat pembangunan. Setiawan (2025) menjelaskan bahwa aspek regulasi memiliki peran penting dalam mengarahkan tujuan hilirisasi. Judijanto (2025) mengaitkan penguatan tata kelola dengan upaya menjaga posisi ekonomi nasional dalam hubungan perdagangan internasional.

Strategi pemerataan dapat dilakukan melalui penguatan industri hilir pada wilayah yang belum menjadi pusat utama investasi. Abdullah dan Sumner (2025) menjelaskan bahwa pembangunan keterkaitan industri menjadi instrumen untuk memperluas manfaat transformasi ekonomi. Rifa'i et al. (2025) menunjukkan bahwa dampak hilirisasi akan lebih merata apabila aktivitas ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada satu kawasan produksi. Nursahan dan Sunuhadi (2023) mengemukakan bahwa persebaran sumber daya mineral di berbagai wilayah memberikan peluang pengembangan pusat industri baru.

Peningkatan kapasitas daerah menjadi strategi lain yang dapat mendukung distribusi manfaat ekonomi secara lebih proporsional. Kapasitas tersebut mencakup kualitas sumber daya manusia, infrastruktur pendukung, serta kemampuan kelembagaan pemerintah daerah. Adam dan Nurwanah (2025) menunjukkan bahwa daerah penghasil sumber daya menghadapi tantangan dalam mengelola dampak ekonomi yang berkembang dengan cepat. Malik (2024) menjelaskan bahwa pengembangan keterampilan tenaga kerja lokal menjadi bagian

penting dalam integrasi masyarakat ke dalam rantai nilai industri. Cerri et al. (2025) mengaitkan peningkatan kapasitas tenaga kerja dengan peluang memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar.

Kebijakan redistribusi fiskal dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan yang muncul akibat konsentrasi investasi pada wilayah tertentu. Adam dan Nurwanah (2025) menjelaskan bahwa peningkatan penerimaan daerah dari sektor sumber daya alam perlu diimbangi dengan mekanisme distribusi yang mempertimbangkan kebutuhan pembangunan regional. Abdullah dan Sumner (2025) menekankan pentingnya kebijakan yang mampu memperkuat keterhubungan ekonomi antardaerah. Myllyvirta et al. (2024) mengemukakan bahwa distribusi manfaat ekonomi menjadi salah satu faktor yang menentukan kualitas hasil pembangunan industri hilir.

Penguatan UMKM dan ekonomi lokal dapat memperluas keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi yang berkembang di sekitar kawasan industri. Astuti et al. (2025) menilai bahwa pendekatan berbasis komunitas dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Bria et al. (2025) menjelaskan bahwa solusi terhadap persoalan industri mineral memerlukan integrasi berbagai aktor ekonomi pada tingkat lokal maupun nasional. Abdullah dan Sumner (2025) menunjukkan bahwa penguatan keterkaitan ekonomi lokal berpotensi meningkatkan penyebaran manfaat hilirisasi ke luar kawasan industri

utama sehingga ketimpangan spasial dapat ditekan melalui mekanisme ekonomi yang lebih terhubung.

D. Kesimpulan

Kebijakan hilirisasi industri di Indonesia telah mendorong peningkatan investasi, pengembangan kawasan industri, dan pertumbuhan aktivitas ekonomi pada wilayah penghasil mineral, terutama di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Hilirisasi juga menunjukkan adanya perubahan struktur ekonomi dari aktivitas ekstraksi menuju pengolahan mineral bernilai tambah yang lebih terintegrasi dengan rantai nilai global. Perkembangan tersebut berkontribusi terhadap munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memiliki peran strategis dalam industri nikel nasional.

Kajian ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomi hilirisasi cenderung terkonsentrasi pada wilayah yang menjadi pusat investasi dan pengolahan mineral sehingga berpotensi memperkuat ketimpangan spasial dengan daerah non-penghasil. Distribusi kekuasaan ekonomi juga mengalami perubahan melalui meningkatnya pengaruh kawasan industri, perusahaan besar, dan investor dalam aktivitas ekonomi regional. Penguatan keterkaitan ekonomi antardaerah, peningkatan kapasitas lokal, serta perbaikan tata kelola sumber daya diperlukan untuk mendukung distribusi manfaat pembangunan yang lebih merata dalam proses hilirisasi industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., & Sumner, A. (2025). *Linkage development as industrial policy: The state and structural transformation in resource-rich countries* (UNU-WIDER Working Paper No. 2025/29). United Nations University World Institute for Development Economics Research.
<https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/Publications/Working-paper/PDF/wp2025-29-linkage-development-industrial-policy.pdf>
- Abdullah, I., & Sumner, A. (2025). *Linkage development as industrial policy*. UNU-WIDER Working Paper.
<https://www.econstor.eu/bitstream/10419/322102/1/1924755823.pdf>
- Adam, M., & Nurwanah, A. (2025). Resource boom and fiscal dependence in an archipelagic province: Evidence from North Maluku, Indonesia. *Amkop Management Accounting Review*, 5(1).
<https://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/amar/article/view/3168>
- Astuti, R., Raman, S., & Yeremia, A. E. (2025). Putting community-centric justice into just transitions from the Global South: The case of Indonesia's nickel sector. *Environmental Research Letters*, 20(6).
<https://doi.org/10.1088/1748-9326/adc8b9>

- Astuti, R., Raman, S., & Yeremia, A. E. (2025). *Putting community-centric justice into just transitions from the Global South*. Australian National University Working Paper. <https://openresearch-repository.anu.edu.au/items/2b1c50f0-042f-4ba2-9873-cc3f1afef910>
- Bria, E., Kemp, D., Kuswati, R. A., Sturman, K., & Saputra, M. R. U. (2025). A holistic framework for examining complex problems in energy transition solutions. *One Earth*, 8(4), 101244. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2025.101244>
- Cerri, K., Mexi, M., Verghese, A. S., & Jha, M. (2025). *Building the trade-labour nexus in Indonesia's nickel value chain*. Geneva Graduate Institute. <https://repository.graduateinstitute.ch/record/321693/files/Builing%2Bthe%2BTrade%2BLabour%2BNexus%2Bin%2BIndonesias%2BNickel%2BValue%2BChain%2BFINAL.pdf>
- Dorigné-Thomson, C. (2023). Redefinition and principal instigators of Indonesia's foreign policy towards Africa. In C. Dorigné-Thomson, *Indonesia's engagement with Africa* (pp. xx–xx). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-99-6651-6_5
- Judijanto, L. (2025). Recalibrating reciprocity: Strategic implications of the 2025 Indonesia–United States reciprocal trade agreement for economic sovereignty and national resilience. *European Journal of Management and Business Economics*. <https://ejmeb.com/index.php/journal/article/view/162>
- Kurniawan, N. I., Winanti, P. S., & Cahyati, D. D. (2025). Recarbonization through decarbonization: Nickel extraction and the deepening of fossil fuel dependence in Indonesia. *Global Environmental Politics*, 25(3), 118–137. https://doi.org/10.1162/glep_a.00798
- Libassi, M. (2025). Mineral intensive: Digging for batteries and the case of Indonesian nickel. *Environment and Society*, 16(1), 97–115. <https://doi.org/10.3167/ares.2025.160106>
- Malik, R. H. (2024). *Stakeholder views on the uptake of sustainable and responsible nickel mining and processing supply chains for electric vehicles in Indonesia* (Doctoral dissertation). University of Queensland. <https://search.proquest.com/openview/5c683cbbd1c6ef829666ebed47b02edc/1>
- Myllyvirta, L., Hasan, K., Kelly, J., & Parapat, J. (2024). *Debunking the value-added myth in nickel downstream industry: Economic and health impacts*. Centre of Research on Energy and Clean Air (CREA) & Center

- of Economic and Law Studies (CELIOS).
https://celios.co.id/wp-content/uploads/2024/02/EN-CREA_CELIOS-Indonesia-Nickel-Development-compressed.pdf
- Nursahan, I., & Sunuhadi, D. N. (2023). *Nickel-cobalt*. Geological Agency, Ministry of Energy and Mineral Resources, Republic of Indonesia.
<https://geologi.esdm.go.id/storage/publikasi/kcVEQXADi0eq4J94sT1N1Ri8BgnURtxdEFTrvwO7.pdf>
- Rifa'i, A., Purwoharyono, D., & Ramadhan, M. F. (2025). Economy-wide impacts of natural resource downstream policy: A case of nickel moratorium in Indonesia. *Mineral Economics*. Advance online publication.
<https://doi.org/10.1007/s13563-025-00562-2>
- Setiawan, E. B. (2025). *Reassessing sovereignty and sustainability in nickel downstreaming: An economic analysis of Indonesia's legal framework*.
https://www.academia.edu/download/132485811/Endrianto_Bayu_Setiawan_EAL.pdf
- Supriadi, S., Saleng, A., & Yusuf, N. N. Y. (2025). Corruption on nickel mining in North Konawe: Impacts and reforms for environmental justice. *Journal of Law and Environmental Justice*.
<https://journal.iueam.org/index.php/JLEJ/article/view/185>
- Tela, I. A., & Yu, Z. (2025). Examining the global perception of nickel mining environmental impact: A case study of China–Indonesia public opinion on Earth's sustainability. In *Proceedings of the International Conference on Sustainability and Global Studies (ICSGS 2024)*. Atlantis Press.
<https://www.atlantispress.com/proceedings/icsgs-24/126008167>
- Warburton, E. (2024). Nationalist enclaves: Industrialising the critical mineral boom in Indonesia. *The Extractive Industries and Society*, 19, 101538.
<https://doi.org/10.1016/j.exis.2024.101538>